

PERMOHONAN PERALIHAN KEWARGANEGERAAN OLEH PEJABAT DIPLOMATIK LIBYA DITINJAU DARI PROTOKOL TAMBAHAN 1961 TENTANG PEROLEHAN KEWARGANEGERAAN

Nama : Alfinsa Rachman Saputra
Jurusan/Progam Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Pembimbing : Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.
Suhariwanto, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Abstrak – Penelitian berjudul Permohonan Peralihan Kewarganegaraan Oleh Pejabat Diplomatik Libya Ditinjau Dari Protokol Tambahan 1961 Tentang Perolehan Kewarganegaraan, dengan membahas permasalahan apakah pejabat diplomatik Libya yang meminta suaka untuk mendapatkan status pengungsi dan kewarganegaraan tidak melanggar kewajiban Protokol Tambahan 1961 tentang Perolehan Kewarganegaraan. Penelitian dengan pendekatan undang-undang, konsep dan kasus, diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: bahwa pejabat diplomatik Libya tidak bisa mengajukan permintaan suaka untuk mendapatkan status pengungsi dan kewarganegaraan kepada Kanada menurut Pasal 2 Protokol Tambahan 1961 tentang Perolehan Kewarganegaraan karena dapat membahayakan keamanan dan ketertiban umum di Kanada dan para pejabat diplomatik Libya tersebut yang menjadi pelarian politik dan mendapatkan adanya indikasi persekusi jika mereka kembali ke negara asalnya maka mereka harus membuktikan terlebih dahulu indikasi persekusi tersebut sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permintaan suaka untuk mendapatkan status pengungsi dan kewarganegaraan di Kanada menurut Pasal 5 dan 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.

Kata Kunci : Pejabat Diplomatik, Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia, Suaka, Status Pengungsi, Persekusi.

**THE APPLICATION FOR TRANSFER OF CITIZENSHIP BY
THE LIBYAN DIPLOMATIC OFFICERS VIEWED FROM
THE 1961 OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA
CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS,
CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY**

Name : Alfinsa Rachman Saputra
Department/Study Program : Law/Legal Studies
Advisor : Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.
Suhariwanto, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

Abstract – This study discussed the issue whether the Libyan Diplomatic Officers who sought for asylum in order to obtain the status as refugee and new citizenship did not break the regulations of the 1961 Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, concerning Acquisition of Nationality. This study used a legal, concept, and case approach, and concluded as follows: The Libyan Diplomatic Officers could not seek asylum to obtain the status as refugee and apply citizenship in Canada according to the Article 2 1961 Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, concerning Acquisition of Nationality because it might endanger and disturb the public in Canada, and the Libyan Diplomatic Officers could become a political fugitive and received an indication of persecution if they return to the country of origin. Therefore, they had to prove the indication of persecution as the ground to apply for asylum in order to obtain the refugee status and citizenship in Canada according to the Article 5 and 14 of the 1948 Universal Declaration of Human Rights.

Keywords : Diplomatic Officers, Citizenship, Human Rights, Asylum, Refugee Status, Persecution.